

TAJUK RENCANA

Jangan Sombong dan Egois

HARI-HARI terakhir ini Covid-19 makin menjadi perhatian. Berbagai kasus warga terpapar yang muncul di sejumlah daerah yang semula tak terduga. Bukan hanya di Kudus yang mengejutkan, karena sedikitnya 300 tenaga kesehatan terpapar. Namun juga di Bangkalan Madura, yang semula dianggap rendah tetapi ternyata di-am-diam merah membara.

Di DIY, sejumlah kasus kluster kampung masih dalam proses isolasi mandiri. Di Sleman sejumlah dusun, setelah *tracing* diketahui karena layanan yang abai protokol kesehatan, ada yang karena kondangan. Di kota Yogya lantaran acara sawalwan. Terakhir, kluster pabrik tas di Gunungkidul yang terpapar bertambah, sementara 1 orang meninggal dunia (KR 8/6).

Di Jawa Tengah, semula hanya Kudus, Brebes dan Sragen, kini meluas menjadi 8 kabupaten. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, memanggil khusus 8 bupati untuk lebih memberi perintah akan lebih ketat mengawasi semuanya. Pemerintah kemudian mengirimi dokter dan perawat tambahan ke daerah tersebut untuk membantu mengurangi tekanan tugas para tenaga medis.

Di Jawa Timur, Madura yang membara kemudian membuat para warga yang terpapar dikirim ke Surabaya lantaran fasilitas kesehatan di pulau garam tersebut kekurangan. Di luar Jawa lainnya seperti Aceh, Riau yang semula rendah kasus, kini masuk 5 besar warga yang terpapar.

Kondisi yang memburuk, membuat Kapolri dan Panglima TNI safari ke Jateng mengingatkan agar jangan abai terhadap protokol kesehatan. TNI dan Polri engekan jajarannya untuk tetap ketat, jangan kendor mengingatkan masyarakat agar taat pada protokol kesehatan. Jangan merasa sakti, karena sudah divaksin.

Menangani wabah, tentu tidak sama.

Karakter masing-masing daerah harus dipahami agar penanganan menjadi efektif. Dalam Bahasa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, harus dijabarkan dan diselenggarakan dengan karakter dan kondisi masing-masing daerah. Kondisi harmoni akan sulit tercapai, jika pemerintah gas pol dalam penanganan tersebut, tanpa diselenggarakan dengan daerah. Karena, 50% mesin pemerintahan ada di tangan provinsi, kabupaten dan kota.

DIY misalnya, sudah wanti-wanti soal protokol kesehatan. Tradisi yang mengundang kerumunan, harus dihilangkan. Sehingga tradisi Gunungung atau Sekatan atau hajatan yang mengundang kerumunan untuk sementara ditiadakan. Tujuannya, semata-mata menjaga agar tak terjadi kluster-kluster baru.

Namun tugas kepala daerah, harus bisa menyeimbangkan masalah Covid-19 dengan pergerakan ekonomi. Ini tidak mudah. Apalagi ada desakan, bahwa dalam dunia pendidikan hendaknya segera adakan sekolah tatap muka. Sejumlah sekolah di DIY sudah mencoba, meski dengan pengawasan ketat.

Karena itulah, seperti pesan Gubernur DIY, warga jangan sombong dan egois (8/6). Sombong merasa kuat, seolah-olah 'sakti' dan egois dengan mengadakan acara yang mengundang kerumunan tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Karena itulah, tampaknya literasi penanganan Covid-19 harus terus dilakukan, khususnya di daerah-daerah yang makin menjadi-jadi karena makin banyak. Satgas Covid-19 dimana pun harus lebih disiplin. Masyarakat disadarkan agar jangan sombong seolah-olah tahu, sehingga abai prokes.

Jangan egois, untuk kepentingannya sendiri. Sehingga mengendorkan prokes. (***)

Tinjauan Filosofis 'Nuthuk'

VIRALNYA warung pecel lele di lahan Kawasan Mahioboro yang *nuthuk* dengan mematok harga Rp 37.000 per porsi menarik perhatian publik. *Nuthuk* semula bermakna memukul benda dengan alat kecil seperti memukul paku dengan palu besi. Selain *nuthuk* dikenal pula kata *ngepreuk* yang dilakukan dengan menggunakan media yang lebih besar. Kepala bisa saja kena kepreuk.

Makna harafiah *nuthuk* dan *ngepreuk* lantas mengalami pergeseran ketika digunakan secara kias. Ketika seseorang makan di sebuah warung dan dipungut harga terlalu tinggi dibanding harga wajar, ia menjadi korban pedagang *nuthuk*. Biasanya korban-nya bukan pelanggan. Dianggap orang asing yang kemungkinan hanya sekali singgah di warung itu.

Landasan Filosofis

Nuthuk setidaknya dilandasi oleh dua landasan filosofis. Pada satu sisi pemilik warung ingin mendapatkan keuntungan di atas kewajaran secara instan. Caranya ia mematok harga jauh lebih tinggi. Harga satu paket porsi pecel lele yang umumnya dipatok Rp 18.000 dinaikkan menjadi dua kali lipatnya tanpa ada pemberitahuan awal. Ia memanfaatkan kesempatan transaksi yang terbatas itu.

Ketika berita *nuthuk* beredar luas, banyak tanggapan warga yang sebagian besar menganggap itu perilaku buruk bahkan mengarah ke kejahatan bisnis. Paling ringan berkomentar kalau *nuthuk* itu tidak layak.

Di tengah munculnya cemooh dan protes itu, ada yang menanggapi dengan santai. Mengapa harga di luar kewajaran menu makanan di kafe atau resto mahal tidak ada yang protes? Sedangkan penetapan harga di warung pecel lele itu menghebohkan dunia maya? Yang pasti kalau di kafe atau resto patokan harga sudah diketahui sejak awal. Orang mau menikmati menu makanan dan minuman di kafe, hotel, atau resto mewah tentu harus bersiap merogoh kocek dalam-dalam. Kesepakatan harga su-

Ki Sudadi

dah diketahui sejak awal, maka pembeli tidak merasa dipukul dengan harga yang mengejutkan.

Bagaimana reaksi korban *nuthuk* ini? Tentu merasa kecewa atau sangat kecewa, karena patokan harga tak diketahui sejak awal. Kekecewaan itu tak semata-mata karena nilai uang yang harus

dikeluarkan untuk membayar layanan kuliner yang dinikmatinya. Kalau urusan membayar jajanan dengan harga tinggi sudah biasa. Yang justru mengecewakan konsumen adalah adanya perasaan dicurangi pedagang warung. Dalam hati konsumen mau protes, tetapi ia tidak bisa. Konsumen tak punya kewenangan protes karena kekuasaan mutlak ada di tangan penjual.

Penguasa

Jika dikaji lebih mendalam, *nuthuk* sebenarnya mirip perilaku penguasa yang menggunakan kekuasaan sewenang-wenang untuk mencapai keuntungan dan kejayaan diri sendiri atau kelompoknya. Pada proses ini diterapkanlah *aji mumpung* yang dikenal dalam Budaya

Jawa. *Aji mumpung* itu bisa digambarkan sebagai penggunaan kekuasaan yang seluas-luasnya saat masih berkuasa. Ia yakin kekuasaan itu hanya singkat dan akan hilang dari genggamannya, maka mumpung berkuasa ditumpuklah harta sebanyak-banyaknya, ditempatkan sanak keluarganya dan kroni-kroninya pada posisi aman dan nyaman. Semua itu dilakukan *mumpung* berkuasa.

Nuthuk, diyakini sebagai perilaku yang tidak pantas. Sudah selayaknya pihak berwajib berusaha mencegah dan memberantas tindakan yang merugikan konsumen itu. Upaya hukum untuk menutup warung-warung yang terbukti *nuthuk* dan mematok harga terlalu tinggi sudah tepat. Kewajiban menyediakan daftar menu dan harga yang diberikan ke konsumen sebelum menikmati sajian kuliner perlu dipertahankan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Perlu ditumbuhkan kesadaran kalau pelayanan yang baik, jujur, dan profesional membangun kepercayaan publik. Kepercayaan itu akan mendatangkan pembeli. Pembeli yang puas oleh pelayanan dan tawaran cita rasa akan menjadi pelanggan setia. Banyaknya pelanggan, otomatis akan memberi keuntungan finansial sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha.

***Ki Sudadi, Penulis Sastra lan Budaya, Kepala SMP Negeri 4 Wadasintang, Wonosobo.**



KR-JOKO SANTOSO

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi *Kedaulatan Rakyat*
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Masalah Sampah

DALAM obrolan ringan di pos ronda, seorang teman bercerita tentang makin banyaknya sampah rumah tangga dibuang ke saluran irigasi. Juga perilaku orang yang 'tega' membuang sampah di pinggir jalan dan sekitar jembatan. Di pinggir jalan, kadang-kala ditemukan kantong kresek berisi sampah. Pemah teramat, pembungkusannya robek sehingga sampah berceceran mengotori jalan. Di beberapa jembatan yang sepi, ditemukan sampah terbungkus rapi teronggok di tepi sungai dan sekitar jembatan. Selain mengganggu kelancaran air di jaringan irigasi, sampah-sampah tersebut juga menimbulkan suasana tidak nyaman dan menyebabkan masalah kesehatan.

Sudah banyak upaya yang dilakukan warga masyarakat untuk mencegah buangan sampah sembarangan. Di tempat pembuangan sampah ilegal diberi tanda peringatan, larangan bahkan ancaman yang menyebarkan. Di tepi jembatan diberi tanda peringatan, dipasang jaring untuk mencegah pembuangan sampah ke sungai. Tetapi mengapa masih terjadi pembuangan sampah rumah tangga ke tempat yang tidak semestinya? Bagaimana mengatasi sampah rumah tangga?

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga. Sepanjang kehidupan berjalan, pasti dihasilkan sampah. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka jumlahnya akan semakin bertambah. Seseorang membuang sampah rumah tangga ke sungai/selokan atau pinggir jalan karena berbagai alasan, antara lain: tidak memiliki lahan pembuangan sampah sendiri, tidak mau repot mengelola sampah, ingin irit dengan tidak mengeluarkan biaya pengelolaan sampah. Dengan membuang sampah sembarangan bukan berarti masalah selesai, melainkan akan menimbulkan masalah baru di pihak lain.

Karena sampah rumah tangga berasal dari dalam rumah, langkah bijaknya jika masalah sampah diselesaikan di tingkat rumah tangga. Anggota keluarga harus berperan aktif dalam mengelola sampah sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-

Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah (*reduce*), daur ulang sampah (*recycle*) dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) atau dikenal 3R. Pengurangan sampah dimulai dari *reduce*, yaitu membatasi calon sampah yang masuk ke rumah. Berbelanja menggunakan kantong sendiri, menghindari menggunakan produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar adalah contoh tindakan mengurangi jumlah sampah.

Reuse dilakukan dengan memanfaatkan wadah yang dapat dipergunakan berulang-ulang, menggunakan kemasan produk untuk polybag tanaman. *Recycle* dilakukan dengan mendaur ulang sampah rumah tangga menjadi produk yang bermanfaat seperti sampah organik diolah menjadi kompos dan sampah kertas dimanfaatkan untuk produk kerajinan.

Melaksanakan 3R dengan sungguh-sungguh akan mengurangi jumlah sampah rumah tangga. Semakin sedikit sampah yang dihasilkan akan memudahkan penanganan sampah. Penanganan sampah dapat dilakukan dengan pemilahan dan pemisahan sampah, mengubur sampah organik/basah, dan bekerja sama dengan jasa pengumpul sampah.

Mengurangi sampah rumah tangga dengan melaksanakan 3R dan menangani sampah rumah tangga dengan baik akan berhasil jika disertai komitmen kuat dan berkesinambungan. Komitmen untuk melaksanakan 3R sehingga terbentuk perilaku hidup bersih, sehat dan minim sampah. Komitmen untuk tidak membuang sampah ke selokan, sungai, dan pinggir jalan serta menyadari bahwa perilaku membuang sampah sembarangan akan merugikan diri sendiri, orang lain dan generasi yang akan datang.

Suharyadi
Guru Fisika SMAN 1 Godean.

Sekolah dan Habitiasi Prokes

Sudaryanto

SAAT pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), sekolah tidak bisa lagi dianggap sebagai momok penyebaran Covid-19. Hanya pihak sekolah, harus sungguh disiplin dalam penegakan protokol kesehatan (*prokes*) terhadap siswanya melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Apa dan bagaimana peran sekolah terkait *prokes*?

Sekolah dapat melaksanakan habitiasi *prokes* terhadap para guru, siswa, dan tenaga kependidikan (*tendik*). Habitiasi, merujuk KBBI V, merupakan pembiasaan pada, dengan, atau untuk sesuatu; atau penyesuaian supaya menjadi terbiasa (*terlatih*) pada habitat dan sebagainya. Artinya, pihak sekolah menjadi contoh pembiasaan disiplin *prokes* bagi masyarakat atau khalayak umum.

Tiga Pihak

Ada tiga pihak yang berkomitmen terhadap habitiasi *prokes* di sekolah. Pertama, para guru, baik perannya sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran (*mapel*), maupun guru wali kelas. Kedua, para siswa di sekolah, baik di jenjang dasar, menengah pertama, maupun menengah atas/kejuruan. Ketiga, para *tendik*, baik perannya sebagai staf tata usaha, laboran, satuan pengamanan (*satpam*), maupun juru bersih.

Komitmen para guru terhadap habitiasi *prokes* dimulai dari keikutsertaannya dalam vaksinasi. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya merinci, jumlah calon penerima vaksin yang terdata adalah sekitar 16.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.000 di antaranya telah menjalani vaksinasi hingga dosis kedua. Kirakira sudah 75% lebih guru di DIY telah divaksin (6/6).

Meskipun telah divaksin, para guru tetap dianjurkan untuk menaati *prokes*. Di sekolah, misalnya, para guru dicek

suhu tubuhnya dulu. Kemudian mereka disarankan memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Bagi guru yang kondisi badannya kurang fit, dianjurkan beristirahat di rumah dan tidak perlu berangkat ke sekolah. Dengan begitu, habitiasi *prokes* di kalangan guru SD, SMP, dan SMA/SMK terwujud dengan maksimal.

Komitmen para siswa terhadap habitiasi *prokes* dimulai dari pengecekan kesehatan dirinya. Sebagai contoh, sebelum menghadapi Asesmen Standar Pendidikan Daerah (ASPD), para siswa kelas VI SDIT Alam Nurul Islam, Yogyakarta mengecek dengan *GeNose*. Bahkan yang unik, saat siswa SMPN 5 Yogyakarta wisuda, *GeNose* menjadi solusi penegakan *prokes* di sekolah. Secara umum, tidak dijumpai siswa yang menolak.

Komitmen para *tendik* terhadap habitiasi *prokes* dimulai dari keikutsertaannya dalam vaksinasi. Seperti guru, para *tendik* juga dianjurkan disiplin *prokes* saat bekerja di sekolah. Para *satpam* dapat mengecek suhu tubuh siswa dan mengingatkan para siswa agar tidak berkerumun saat berangkat dan pulang. Para juru bersih dapat rutin melakukan penyemprotan disinfektan di ruang-ruang kelas yang akan dipakai siswa saat pelaksanaan PTM.

Bekerja Sama

Tiga pihak yang disebutkan di atas, diharapkan memiliki komitmen terhadap habitiasi *prokes* di sekolah. Tanpa itu, kekhawatiran sejumlah pihak akan munculnya kluster sekolah tak

terelakkan. Untuk itu, langkah baiknya pihak sekolah dapat bekerja sama dengan pihak orang tua dan masyarakat untuk terbiasa dalam disiplin *prokes*. Paling tidak, sinergi guru, siswa, dan *tendik* kelak menjadi teladan penegakan *prokes* di sekolah dan berdampak lanjut ke masyarakat.

Tentu saja, komitmen guru, siswa, dan *tendik* di sekolah akan habitiasi *prokes* perlu didukung oleh komitmen pemerintah daerah (*pemda*) di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, seharusnya menjadi pelajaran akan pentingnya habitiasi *prokes*. Terkait itu, sekolah menjadi garda depan penegakan disiplin *prokes* secara bijak dan proporsional. Semoga begitu.

***Sudaryanto MPd, Dosen PBSI FKIP UAD, Mahasiswa S-3 Ilmu Pendidikan Bahasa UNY.**

Pojok KR

Kontestasi Capres mulai riuh.
-- Duh, pikirkan dulu derita rakyat dan pandemi.

Usai lebaran, wisatawan di DIY justru makin banyak.
-- Jangan egois. Kasus pascalebaran, jadikan pelajaran.

Terungkap, setoran perusahaan penyedia Bansos Rp 19, 132 M.
-- Penderitaan rakyat jadi objek korupsi.

Berita

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSo.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan **Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Per Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto. **Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsh, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussenahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSo, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSo, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkrk2@yahoo.com, iklandkrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%